

KEKERASAN DALAM PILKADA DI ACEH PASCA MOU

Oleh : Shary Charlotte HP

Abstract : *This article is aimed to to explain the causes of violence in post MoU's Aceh elections. Eventhough the separatist violence in Aceh was ended in 2005, but violent conflict in Aceh continues to increase and is often concentrated in the pre MoU conflict area. In post-conflict situations, the intensity of the conflict is much reduced; the conflict also becomes less latent, but rarely stops at all. If war has changed the habits and behavior of the people of Aceh to the dominance of violence, the peace treaty seeks to change the behavior, attitudes and contradictions of actors involved by using Disarmament, Demobilization and Reintegration programs. Issues and problems began to emerge in this long term process of reintegration programs. Reintegration program was initially planned to merge the former combatants and the civil societies, but in its progress, this program created a huge gap between them and thus encouraging a conflict-prone condition, especially during the election.*

Keywords : *Aceh, elections, violence, causes, reintegration.*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang sangat menarik untuk dikaji oleh para penstudi perdamaian dan resolusi konflik Internasional. Bagaimana tidak, provinsi ini menjadi ikon keberhasilan resolusi konflik secara damai yang cukup diidolakan oleh dunia internasional. Sejumlah tokoh-tokoh ternama dunia seperti Sekjen PBB Koffi Annan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia John Howard, hingga tokoh perdamaian sekelas Nelson Mandela tidak henti-hentinya memuji keberhasilan resolusi konflik Aceh.

Pemerintah RI yang tadinya menjadi aktor konflik Aceh, kini malah menjadi panutan dunia internasional. Koffi Annan menyebut Presiden SBY telah berhasil merubah "tragedi" bencana tsunami menjadi "peluang" untuk membangun perdamaian di Aceh. PM Inggris, Tony Blair, menyebut Aceh sebagai "contoh dan harapan dalam rekonsiliasi", sedangkan Nelson Mandela memuji Indonesia sebagai "negara yang handal dalam upaya global untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi umat manusia".

Sejak tahun 2005, entah berapa ratus peneliti lokal dan asing yang berbondong-bondong datang ke Aceh hanya untuk menyaksikan dan belajar secara langsung mengenai konflik dan perdamaian di Tanah Rencong ini. Tidak hanya pada level individu, negara-negara asing juga ikut tertarik untuk mempelajari bagaimana Aceh dan pemerintah RI mengelola konflik dan perdamaian. Tahun 2010 lalu, misalnya, pemerintah Nepal sangat antusias untuk mempelajari pola penyelesaian konflik dan penanganan reintegrasi di Aceh. Tampaknya, negara Seribu Kuil tersebut merasa bahwa Aceh dapat dijadikan *prototype*

pembangunan perdamaian yang berlangsung di Nepal sejak 2006, ketika negara tersebut berhasil menghentikan konflik berkepanjangan antara kelompok Maoist dan pemerintah Nepal.

Pada Maret 2012, giliran pemerintah Thailand yang berguru ke Aceh untuk menyelesaikan konflik di provinsi Thailand Selatan yang semakin memburuk setelah masa pemerintahan Thaksin. Tidak hanya negara-negara di Asia, sebanyak 29 delegasi negara Sudan juga ikut berkunjung ke Indonesia pada tahun 2009 untuk mempelajari penanganan rekonsiliasi perdamaian di Aceh.

Namun, benarkah Aceh kini berada dalam keadaan damai tanpa konflik kekerasan?

Awal Januari 2012, masyarakat dikagetkan oleh peristiwa penembakan yang terjadi di dua daerah di Aceh Timur, yakni Blangcot dan Sureuke. Sejak malam pergantian tahun 2012, sudah terjadi 3 penembakan di Aceh yakni : di kawasan Simpang Ilie Ulee Kareng, Banda Aceh, yang menewaskan penjaga toko, Wagino; penembakan di Desa Blangcot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun; serta penembakan di mess pekerja galian kabel Telkom.

Sejumlah pihak mulai menganalisis penyebab masalah ini. Pihak kepolisian Aceh menyatakan bahwa serangan ini murni kriminalitas, Gubernur Aceh saat itu lebih mencurigai permasalahan ekonomi dan kecemburuan sosial sebagai pemicu kemunculan kasus ini. Namun ternyata, penyelidikan lebih lanjut menyimpulkan bahwa insiden penembakan ini terkait dengan Pilkada di Aceh pada Februari 2012.

Penembakan ini seakan membuka kembali konflik-konflik kekerasan dalam pilkada di Aceh. Kekerasan dan kriminalitas seakan sudah menjadi "kebiasaan" menjelang pemilu, bahkan hingga

*) Dosen Jurusan Ilmu Hub. Internasional Undip Semarang

pemilu usai. Tahun 2007 saja, hanya beberapa bulan setelah pemilu, sudah ada belasan tindakan penyerangan kepada aparat daerah. Sebut saja serangan granat ke rumah ketua DPRD (Pidie), gedung DPRD (Bener Meriah), kantor camat (Aceh Tengah), dan rumah bupati (Bireuen), serangan bom ke kantor bupati Kutacane, pembakaran kantor camat yang baru dilantik di Babel dan Badar, hingga penyerangan terhadap konvoi Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, yang kesemuanya terjadi pada Agustus 2007. Ternyata, peristiwa ini hanyalah segelintir kasus kekerasan yang masih marak terjadi dalam proses demokrasi di Aceh.

Uniknya, rentetan kasus kekerasan ini paling banyak terjadi pada masa sebelum hingga setelah pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, padahal selama ini, keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis sering dijadikan titik puncak dari proses perdamaian. Peristiwa ini tentu menjadi antithesis terhadap teori yang selama ini berkembang bahwa demokrasi dan *power sharing* menjadi sarana pening untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng dalam masyarakat pasca konflik. Jelaslah bahwa pemilu ternyata tidak selalu menjamin perdamaian, dan mungkin sebenarnya, justru membuat kondisi masyarakat semakin berbahaya.

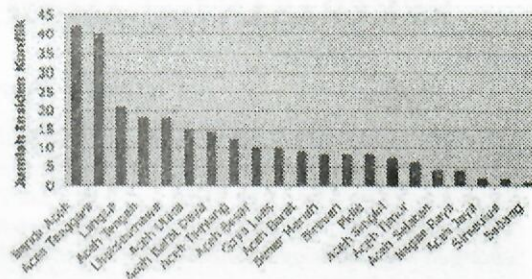
LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak tahun 2005 hingga 2012, Aceh telah mengalami 2 (dua) kali periode pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni tahun 2006 dan tahun 2012. Kedua pemilihan kepala daerah tersebut ternyata tidak dapat dilepaskan dari serangkaian tindakan kekerasan yang menyertainya.

Kekerasan Dalam Pilkada 2006

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006 diselenggarakan di 19 dari 21 kabupaten/kota pada tanggal 11 Desember 2006 dan merupakan pilkada serentak terbesar di Indonesia. Berbeda dengan Pilkada lainnya di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Pilkada di Aceh ini diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), yang bertujuan untuk menghindari persepsi negatif dari mantan kombatan GAM akan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam Pilkada Aceh.

Meski Pilkada tahun 2006 relatif minim kekerasan, namun, menurut laporan Bank Dunia, kekerasan paling banyak terjadi di Banda Aceh Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah (Lihat grafik 7) (*Bank Dunia/DSF, 2006*).



Grafik 1 : Kekerasan Pilkada Aceh 2006 berdasarkan Wilayah

Sumber : Clark, 2008, p.18

Konflik di Bener Meriah, misalnya, daerah yang memiliki sejarah konflik GAM-RI, perbedaan etnis, dan permusuhan perseorangan ini, semakin diperparah oleh persaingan pilkada. Dua diantara kandidatnya dikenal sebagai mantan pemimpin kelompok antiseparatis yang saling bekerja sama selama konflik vertikal, namun kemudian keduanya bersaing dalam pemilihan 2006 dan menemukan basis pendukung yang berbeda diantara para mantan anggota kelompok anti-separatis. Satu orang kandidat yang didukung KPA juga maju dalam pemilihan. Situasi ini telah menghasilkan ketegangan tinggi di dalam kelompok antiseparatis, begitu pula antar kelompok-kelompok ini dan KPA.

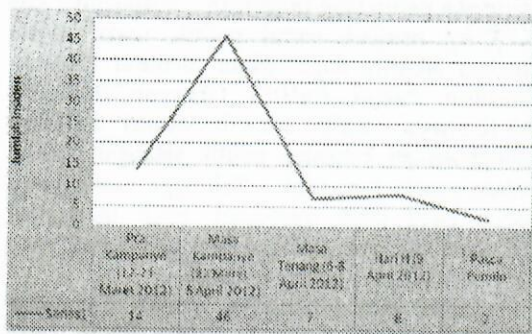
Tidak hanya terjadi pada tahun 2006, konflik politik juga terjadi di tahun 2007, dimana serangkaian peristiwa pelemparan granat terjadi pada bulan April (Lihat kotak 2). Penyerangan tersebut tampaknya lebih bertujuan untuk mengintimidasi daripada untuk membunuh, karena granat dilempar ke gedung dan bukan ke arah orang-orang, serta tidak ada korban luka-luka.

Salah satu contoh konflik kekerasan menyangkut pilkada, terjadi di kabupaten Bireuen, dimana Pilkada Bupati Bireuen yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2007, berujung pada ketegangan selama periode kampanye dan setelah pengumuman hasilnya.

Kekerasan Dalam Pilkada 2012

Pilkada 2012 juga tidak terlepas dari serentetan tindakan kekerasan, entah yang terjadi sebelum hingga setelah diberlangsungkannya pilkada. Dari Grafik 8 di atas terlihat bahwa tindakan kekerasan meningkat ketika masa kampanye, yaitu sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 5 April 2012. Pada masa tenang, kekerasan menurun secara drastis karena pada momen seperti ini biasanya terjadi mobilisasi massa secara besar-besaran dan biasanya berpotensi mengundang konflik, terutama jika terjadi pertemuan yang tidak disengaja antara massa satu kelompok dengan

kelompok lainnya.



Grafik 2 : Kekerasan berdasarkan Tahapan PEMILUKADA

Sumber : *The Aceh Institute, 2012*

The Aceh Institute mencatat adanya 77 kasus kekerasan yang terjadi pada masa pemilukada, dimana 14 kasus terjadi pada masa pra-kampanye, 7 kasus terjadi pada minggu tenang, 8 kasus pada hari pemungutan suara, dan 2 kasus pasca pencoblosan. Kekerasan tersebut berbentuk intimidasi, ancaman psikologis, ancaman psikis, tindakan kekerasan serta perusakan fasilitas dan alat kampanye. Beberapa kasus kekerasan yang muncul pada Pilkada tahun 2012, antara lain : (a) Pelemparan granat di Kantor tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan di Jalan Teuku Daud Bereueh, Banda Aceh (29 November 2011), (b) Penembakan Saifuddin Yunus oleh orang tak dikenal (8 Maret 2012), (c) Pembakaran mobil tim sukses pasangan calon Gubernur Irwandi-Muhyan di Idi Rayeuk Aceh yang menghancurkan bagian pintu mobil (29 Februari 2012), dan (d) Pembrondongan dan pelemparan bom molotov rumah Misbahul Munir (Calon Wakil Bupati Aceh Utara) di desa Keude Kreung, kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara (10 Januari 2012).

PEMBAHASAN

Tidak ada yang memungkiri bahwa situasi pasca perjanjian damai tidak serta merta mengakhiri konflik dan konflik kekerasan di suatu daerah. Sayangnya, selama ini periode *post-conflict peacebuilding* hanya dianggap sebagai periode “sementara” atau periode “diantara” konflik dan perdamaian. Konflik-konflik yang terjadi dalam periode *peacebuilding* pun hanya dianggap sebagai sebuah “proses menuju perdamaian” (Collier et.al,2003:83). Akibatnya, perhatian terhadap kemunculan konflik baru pasca perjanjian damai, sangatlah minim, padahal, konflik yang terjadi selama periode *peacebuilding*

ini dapat dijadikan acuan untuk mencegah kembalinya (*relapse*) ke dalam situasi perang.

Konflik kekerasan yang masih terjadi dalam periode *peacebuilding* ini memiliki terminologi yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya sebagai *post-conflict violence* (Dewhurst,2008), *peacetime violence* (Autesserre,n.d:2), *post conflict risks* (Collier et.al,2006; Preston, 2011), *post-conflict armed violence* (and Berdal,2011:13), atau *post-conflict vulnerability* (Ahmed and Gassmann,2009:20).

Maraknya tindakan kekerasan dalam pilkada di Aceh pasca penandatanganan MoU, lebih disebabkan oleh permasalahan program reintegrasi politik dan militer GAM, sebagai salah satu bagian dari program rehabilitasi pasca konflik yang lebih besar, yakni DDR (*disarmament, demobilization dan reintegration*), serta kurangnya kemampuan dan koordinasi para stakeholder di Aceh.

Permasalahan Reintegrasi Politik

Sejatinya, program reintegrasi bertujuan untuk membaurkan atau meleburkan mantan kombatan ke dalam kehidupan masyarakat sipil, sehingga fragmentasi antara mantan kombatan dan masyarakat sipil akan hilang. Namun, bukannya melebur, pasca reintegrasi politik, masih terdapat perbedaan yang mencolok antara mantan kombatan dengan masyarakat sipil. Hal ini dikarenakan mantan kombatan sendiri enggan untuk mau mengubah identitas mereka dari “Pejuang kemerdekaan” menjadi “anggota masyarakat”, karena identitas mereka sebagai mantan Tentara Nasional Aceh / TNA justru memberikan keuntungan yang besar, mulai dari jaringan terkait patronase dalam sistem politik, kekuasaan dan hak istimewa.

Setelah TNA menjadi Komite Peralihan Aceh / KPA, organisasi ini berubah menjadi suatu organisasi yang sangat eksklusif, bahkan bagi mantan TNA yang menyerah sebelum MoU Helsinki. Akibat eksklusifitas ini, maka terjadilah fragmentasi antara KPA (mantan kombatan GAM), versus bukan mantan kombatan GAM. Dikotomi ini tampak dalam kategorisasi dalam pemberian bantuan dari pihak Badan Reintegrasi Aceh / BRA. Saat ini bahkan muncul istilah PETA (Pembela Tanah Air) yang dapat dengan mudah dilihat sebagai organisasi yang pro pemerintah pusat. Selain itu, masih terlihat adanya pemisahan antara kelompok yang pada masa pra MoU mendukung pemerintah pusat, dengan kelompok mantan GAM. Dikotomi semacam ini berlangsung di setiap lini proses *peace building* Aceh, mulai dari pemberian dana bantuan rehabilitasi pasca

konflik, praktik politik, hubungan masyarakat, hingga kontestasi Pilkada.

Dalam partai pemilu 2006, misalnya, dari enam partai lokal peserta pemilu, selain Partai Aceh, setidaknya ada dua partai yang masih memanfaatkan simbol-simbol GAM sebagai alat untuk mendapat simpati masyarakat, yakni Partai Rakyat Aceh dan Partai Suara Independen Rakyat (SIRA). Partai Rakyat Aceh berisi sekumpulan aktivis yang dulu sejalan dengan perjuangan GAM yakni membebaskan rakyat Aceh dari penindasan dengan cara membangun jaringan dan melakukan sejumlah aksi massa. Sekjen PRA Thamrin Ananda selaku sekretaris partai Rakyat Aceh, misalnya, sempat melakukan sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta terkait Aceh. Sedangkan Partai SIRA lebih merupakan *underbow* atau sayap non-kekerasan GAM. SIRA tercatat pernah menggelar demonstrasi besar-besaran dengan 80.000 orang di Banda Aceh pada 1999 dan 2006 (Bhakti,2008:160-161).

Sayangnya, meski kedua partai ini juga berisikan mantan GAM, namun terkesan dimusuhi oleh PA dan KPA, dimana PA mengklaim bahwa partainya merupakan satu-satunya partai yang sesuai dengan amanah MoU Helsinki, sementara partai lokal lainnya hanya sebagai "anak haram" yang hanya berupaya untuk merebut kekuasaan politik (Suadi,2011).

Dikotomi-dikotomi semacam ini tentu saja berlawanan dengan tujuan utama reintegrasi yakni menyatukan kembali kelompok-kelompok yang dahulu terpisah-atau berupaya untuk memisahkan diri- menjadi satu kembali sebagai warga negara sipil RI. Selain itu, dikotomi ini juga sangat membahayakan tujuan utama dari reintegrasi politik itu sendiri yakni mentransformasikan GAM sebagai kekuatan bersenjata menjadi kekuatan politik.

Tidak hanya itu, dikotomi ini juga sangat rawan konflik. Potensi konflik dalam tubuh GAM bisa terjadi pada dua level. Pertama, antara petinggi GAM dengan komponen pimpinan di level menengah. Potensi konflik ini menyangkut posisi politik dan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan ekonomi. Kedua, antara pimpinan menengah GAM dengan level bekas prajurit di lapangan. Hanya ada 3.000 anggota, GAM yang memperoleh dana reintegrasi, padahal, anggota GAM sendiri jumlahnya jauh lebih banyak dari angka itu, sehingga mereka yang tidak mendapat bantuan reintegrasi seringkali merasa kecewa, frustrasi dan mudah terpicu konflik.

Salah satu implementasi reintegrasi politik adalah metamorfosis TNA menjadi KPA, dan karena KPA ini bukanlah partai politik, maka

lembaga ini tidak dapat diatur dan tunduk pada kerangka perundang-undangan. Seandainya saja KPA ini menjadi partai politik, maka segala tingkah lakunya dapat diatur menurut Undang-Undang Partai Politik (Basyar,2008:53). Akibatnya, KPA masih dapat leluasa menggunakan kekuatan politik setengah militer dalam proses berpolitik. Sehingga masih perlu usaha yang lebih maksimal untuk mengubah kekuatan kombatan sebagai kekuatan politik yang dapat diatur oleh undang-undang.

Salah satu contohnya adalah kehadiran kelompok milisi, termasuk Satgas Partai Aceh yang baru didirikan tahun 2012. Satgas Partai Aceh dibentuk untuk mengawal dan mengamankan acara-acara internal Partai Aceh. Kelompok ini disinyalir sering memata-matai setiap pergerakan sipil dan sering menggunakan cara-cara intimidasi dan kekerasan seperti yang terjadi di Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, pemukulan terhadap mantan gubernur, Irwandi Yusuf, di Banda Aceh; konflik tanah di Singkil; konflik eksplorasi gas alam oleh perusahaan Zaratex di Nisam, Aceh Utara; dan insiden penembakan di Aceh Timur.

Permasalahan program reintegrasi ini sebenarnya bukan hanya terletak pada kesalahan mantan kombatan GAM, melainkan adanya ketidaksinergian antara keinginan para stakeholder untuk "meleburkan" mantan kombatan, dengan melakukan *power sharing* agar mantan kombatan tidak kecewa dengan perdamaian yang telah dicapai. Dengan menerapkan prinsip *power sharing*, tentu saja mantan petinggi GAM akan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada masyarakat sipil di Aceh, dan hal ini sangat kontradiktif dengan program reintegrasi yang bertujuan untuk meleburkan mantan kombatan GAM. Bagaimana bisa mantan kombatan GAM yang seluruhnya tergabung dalam KPA dan mendapatkan kekuasaan penuh, dapat meleburkan diri sebagai masyarakat Aceh?

Keterbatasan Kemampuan dan Koordinasi Para Stakeholder

Tingkat kekerasan yang terjadi pada pilkada Aceh memang dapat dikatakan rendah, mengingat Aceh baru saja menikmati situasi damai setelah 30 tahun dilanda konflik kekerasan. Meski demikian, konflik dan kekerasan terkait pilkada masih sering dilakukan. Pengamatan terhadap masalah-masalah ini memperlihatkan beberapa kelemahan yang signifikan pada pelaksanaan pilkada secara kelembagaan, seperti : (a) pengawasan pilkada yang masih rendah sehingga memungkinkan

sejumlah pihak untuk melakukan tindakan kekerasan; (b) penyelidikan sengketa dan pelanggaran terkait pilkada masih tidak efektif, hal ini terukti dari mandegnya penyelidikan sejumlah kasus kekerasan; dan (c) kurangnya transparansi dalam pengawasan prosedur dana kampanye dan kinerja petugas pilkada.

Bila tidak segera diatasi, kelemahan-kelemahan ini akan menjadi batu sandungan dalam membangun *good governance* di Aceh, dan berpotensi menimbulkan kekecewaan di antara fraksi-fraksi elit yang akan mengarah pada tindakan kekerasan lanjutan. Di sisi lain, karena buruknya pelaksanaan peraturan dana kampanye, maka *civil society* akan kehilangan suatu alat penting dalam menuntut akuntabilitas pemerintah pada masa mendatang. Hal ini mungkin akan berdampak buruk terhadap upaya-upaya membangun pemerintahan yang bersih dan pembuatan kebijakan yang efektif.

Pemimpin politik Aceh yang mendiami DPRA juga belum mampu menciptakan keadaan politik Aceh yang demokratis setelah tujuh tahun penandatanganan MoU Helsinki. Kelima kandidat gubernur/wakil gubernur yang mengaku mendapat serangan terror, ternyata belum mampu mengajak massa supaya beraksi secara lebih demokratis.

Di kemudian hari, Pemerintah Aceh dan harus mampu meyakinkan para pihak untuk menghentikan keadaan politik yang penuh kekerasan, menggelar deklarasi damai dan dialog politik yang sehat bagi para kandidat dan pendukungnya untuk menyukseskan pelaksanaan pemilukada secara demokratis dan menyukseskan pembangunan Aceh pasca-konflik.

PENUTUP

Pasca MoU, Aceh telah mengalami 2 (tiga) kali masa pemilihan kepala daerah atau Pilkada, yakni tahun 2006 (dimana Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh pertama pasca MoU), dan tahun 2012. Dan hampir serupa dengan proses pemilihan kepala daerah di daerah lain, konflik kekerasan juga mewarnai proses Pilkada Aceh, mulai dari perusakan alat dan sarana kampanye pihak lawan, hingga kekerasan yang sifatnya personal, seperti ancaman psikologis, dan kekerasan fisik seperti pemukulan, percobaan pembakaran, pelemparan granat, hingga percobaan pembunuhan.

Kekerasan dalam Pilkada di Aceh dapat dikategorikan sebagai kekerasan pasca konflik atau *post conflict violence*, karena konflik tersebut terkonsentrasi di wilayah-wilayah konflik pra MoU. Dan dengan menggunakan teori *post conflict violence*, maka kita dapat melihat bahwa

perubahan pasca perjanjian damai telah mempengaruhi hubungan masyarakatan dan perilaku kekerasan mantan kombatan GAM. Pasca MoU, Aceh mengalami fase *peace building*, dimana program-program pembangunan pasca konflik pun mulai membanjiri Aceh. Salah satu program ini adalah program reintegrasi mantan kombatan GAM, yang bertujuan untuk meleburkan mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat sipil, dimana mantan kombatan GAM dirubah menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA), dan Partai Aceh (PA). KPA berisikan petinggi GAM, yang mengatur strategi politik dan ekonomi bagi keberlangsungan aktivitas mantan kombatan GAM, sedangkan PA merupakan kendaraan politiknya.

Sayangnya, program reintegrasi ini bukannya meleburkan mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat sipil, namun justru menciptakan jurang yang lebar antara mantan kombatan GAM dengan masyarakat bukan GAM. Selain itu, meskipun GAM telah resmi dibubarkan, namun KPA dan PA masih merupakan anggota GAM, sehingga mentalitas kekerasan masih melekat dalam diri KPA dan PA. Mentalitas kekerasan ini ternyata sangat berpengaruh pada tindakan kekerasan yang dilakukan kedua organisasi ini pada masa Pilkada.

Namun, kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan KPA dan PA sebagai aktor satu-satunya dalam konflik Pilkada di Aceh, karena konflik kekerasan semacam ini sebenarnya dapat diminimalkan dengan koordinasi yang sinergis para stakeholder di Aceh, seperti Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Forum Bersama (Forbes), dan tentunya pengawasan yang lebih ketat dari Komite Independen Pemilihan (KIP), sebagai pihak yang paling berwenang dalam mengawasi proses Pilkada Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Maha dan Gassmann, Franziska (2009). *Defining Vulnerability in Post Conflict Environments*. Retrieved from Maastricht Graduate School of Governance, Netherlands, diakses pada 18 Maret 2012

<http://www.merit.unu.edu/publications/mgso_g_wppdf/2009/wp2009-022.pdf>

Bank Dunia/DSF (2006). *Laporan Hasil Pemantauan Konflik Aceh, 31 Desember 2006, diakses pada 19 September 2011, Aceh, Indonesia :*

< http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/peace_process_bhs/peace_process_augmou/peace_process_augmou_analysis/peace_augmou_analysis_2006_12_31.pdf

Basyar, M. Hamdan (ed) (2007). *Reintegrasi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Pusat Penelitian Politik LIPI : Jakarta.

Bhakti, Ikrar Nusa (2008). *Beranda Perdamaian : Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.Suadi,2011

Clark, Samuel dan Palmer, Blair (2008). *Pilkada Pasca Konflik di Aceh dan Implikasinya*. Jakarta : World Bank

Collier, Paul (2009). *Post-conflict Recovery: How Should Strategies Be Distinctive?*. *Journal of African Economies*, 18(1) p. 99-131.

Dewhurst, Sarah Elizabeth (2008). *Explaining Enduring Violence in Post Independence Timor-Leste*. University of York, diakses pada 11 Februari 2012 : <http://cultura.gov.tl/sites/default/files/SDewhurst_Violence_is_just_a_part_of_our_culture_2008.pdf>

Séverine Autesserre (n.d). *Peacetime Violence, Post-Conflict Violence and Peace-building Strategies*, diakses dari :

<<http://www.statesandsecurity.org/pdfs/Autesserre.pdf>>

The Aceh Institute (2012). *Final Report for Aceh Electoral Violence & Vote Tabulation Monitoring 2012*. Banda Aceh : The Aceh Institute